

**HAMBATAN PROSES AKSESI TURKI KE UNI EROPA DI ERA RECEP**

**TAYYIP ERDOGAN (2014-2022)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AMALIA SRI SULANJARI**

18323011



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HAMBATAN PROSES AKSESI TURKI KE UNI EROPA DI ERA RECEP**

**TAYYIP ERDOĞAN (2014-2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**AMALIA SRI SULANJARI**

18323011

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Hambatan Proses Akses Turki ke Uni Eropa di Era Recep Tayyip Erdoğan  
(2014-2022)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana  
S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Muhammad Zulfikar Rakhmat B.A., M.A., Ph.D

2. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.

3. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Rabu, 4 Januari 2023



Amalia Sri Sulanjari

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR TABEL</b>	vii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	viii
<b>Abstrak</b>	ix
<b>BAB I Pendahuluan</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	4
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	5
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	6
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	9
Sumber: Diolah mandiri oleh peneliti	12
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	12
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	13
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	14
<b>BAB II</b>	16
<b>Kebijakan Turki dan Hubungan Turki dengan Negara Tetangga</b>	16
<b>2.1. Kebijakan Luar Negeri Turki Era Erdogan</b>	16
<b>2.2 Hubungan Turki dengan Yunani, Suriah, Prancis, dan Belanda</b>	17
2.2.1 Hubungan Turki dengan Yunani	18
2.2.2 Hubungan Turki dengan Suriah	19
2.2.3 Hubungan Turki dengan Prancis	20
2.2.4 Hubungan Turki dengan Belanda	22
<b>2.3 Politik Domestik Turki Era Erdogan</b>	24
<b>BAB III</b>	28
<b>3.1 Identitas “Islam” dan “Demokrasi Konservatif” yang Dianut oleh Erdogan</b>	28
<b>3.2 Pidato Erdogan Sebagai Konstruksi Sosial</b>	36
3.2.1 Pidato Erdogan Menanggapi Isu Internasional	36

3.2.2 Pidato Erdogan Menanggapi Isu Domestik	40
<b>BAB IV</b>	44
2.1. Kesimpulan	44
2.2 Rekomendasi	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	47



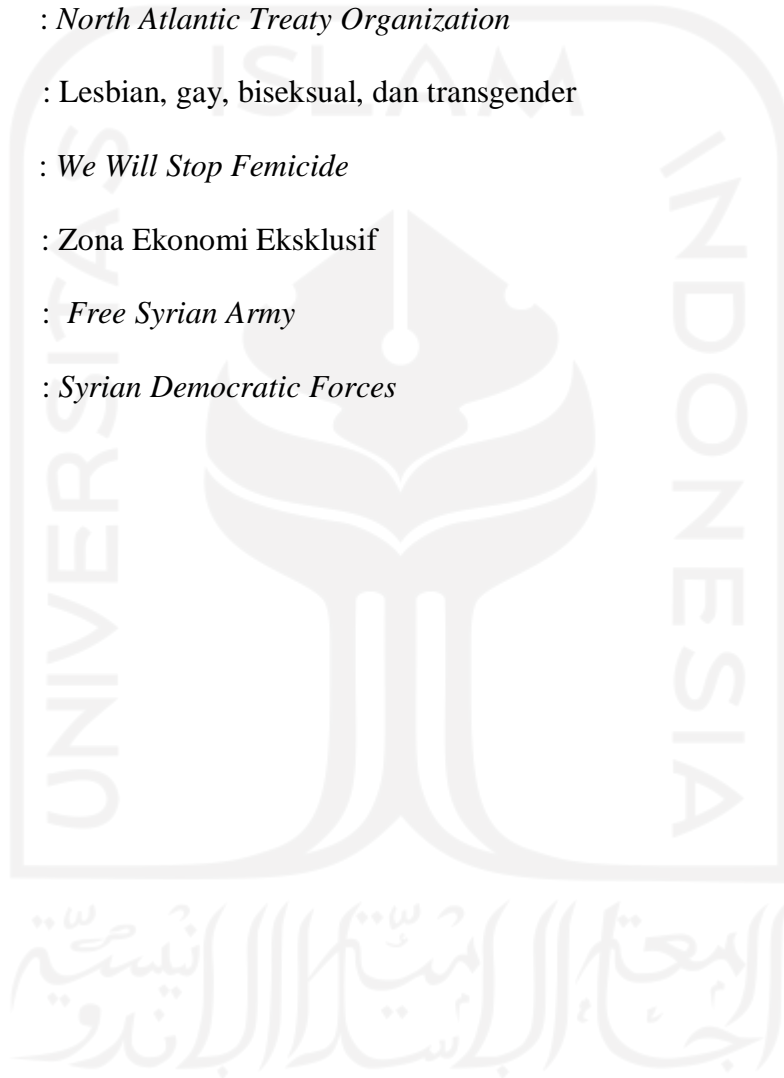
## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Uraian Poin-Poin Teori Konstrutivisme Menurut Onuf.....	12
---	----



## DAFTAR SINGKATAN

EU	: <i>European Union</i>
UE	: Uni Eropa
AKP	: <i>Adalet ve Kalkinma Partisi</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
LGBT	: Lesbian, gay, biseksual, dan transgender
WWSF	: <i>We Will Stop Femicide</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
FSA	: <i>Free Syrian Army</i>
SDF	: <i>Syrian Democratic Forces</i>





## Abstrak

Turki sudah mengupayakan untuk dapat bergabung ke Uni Eropa sejak lama, namun prosesnya tidak kunjung selesai-selesai, bahkan sempat terjadi pembekuan aksesinya pada masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan apa saja yang membuat Turki mengalami kendala bergabung ke Uni Eropa pada masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan (2014-2022). Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme menurut Nicholas Onuf untuk menganalisis hambatan-hambatan aksesinya Turki ke Uni Eropa. Teori ini memiliki 2 poin utama untuk menjelaskan mengapa sebuah fenomena sosial dapat terjadi. Yang pertama adalah karakter atau asal usul yang dimiliki seseorang individu akan mempengaruhi cara individu tersebut bekerja. Kemudian yang kedua bahwa dengan melihat, merasakan dan mendengarkan individu dapat memiliki interpretasi yang kemudian mempengaruhi cara individu tersebut bekerja. Permasalahan domestik dan Internasional Turki pada era Recep Tayyip Erdogan merupakan akar dari hambatan aksesinya Turki ke Uni Eropa yang kemudian di poles dengan karakteristik "Islam" dan "otoriter" Erdogan yang membuat proses aksesinya Turki menjadi kian terhambat. Ditambah juga dengan pidato-pidato Erdogan yang semakin menguatkan interpretasi "Islam" dan "otoriter" dalam pemerintahan Erdogan yang membuat proses aksesinya menjadi sulit.

Kata Kunci : Turki, Uni Eropa, Aksesinya Turki, Konstruktivisme, Onuf

## Abstract

*Turkiye has been trying to join the European Union for a long time, but the process has not been completed, there was even an accession freeze during the reign of President Recep Tayyip Erdogan. This research aims to find out what obstacles prevented Turkiye from joining the European Union during the reign of President Recep Tayyip Erdogan (2014-2022). The research uses constructivism theory according to Nicholas Onuf to analyze the obstacles to Turkiye's accession to the European Union. The theory has 2 main points to explain why a social phenomenon can occur. The first is that the original character of an individual will affect the way that individual works. Then the second is that by seeing, feeling, and listening, people can have an interpretation which then affects the way they work. Turkiye's domestic and international problems during the Recep Tayyip Erdogan era were the roots of the obstacles to Turkey's accession to the European Union (EU) which were then polished with Erdogan's "Islamic" and "authoritarian" characteristics which made Turkey's accession process even more hampered. Coupled with Erdogan's speeches which further strengthened the interpretation of "Islam" and "authoritarian" in Erdogan's government which made the accession process difficult.*

*Keywords : Turkiye, European Union, Turkiye's accession, Constructivism, Onuf*

## BAB I

### Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Uni Eropa (UE) adalah organisasi antarpemerintah dan supranasional yang terbentuk pada 7 Februari 1992 melalui penandatanganan *the Treaty on European Union* (TEU) setelah beberapa kali mengalami perubahan nama. Beberapa negara anggota Uni Eropa diantaranya adalah Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, dan Estonia. Terbentuknya Uni Eropa ini merupakan bentuk dari upaya penyatuan negara-negara di benua Eropa yang sebenarnya sudah diupayakan sejak tiga ribu tahun lalu. Selain keinginan untuk menyatukan negara-negara di benua Eropa, pendirian Uni Eropa ini juga memiliki harapan untuk dapat menjadi tonggak terciptanya blok besar yang berpusat di Eropa. Sejak awal pendirian Uni Eropa, harapan menjadi tonggak terciptanya blok besar ini sudah menjadi salah satu alasan terbentuknya Uni Eropa.

Untuk dapat dikatakan sebuah blok besar maka, Uni Eropa harus memperbesar lingkarannya, yakni menambah anggota Uni Eropa. Peraturan mengenai perluasan anggota ini disebut *enlargement policy*. *Enlargement policy* merupakan suatu proses panjang dan kompleks yang dilakukan oleh pihak-pihak Uni Eropa dalam menentukan layak atau tidak layaknya suatu negara dapat menjadi bagian dari Uni Eropa. Namun, pada prakteknya, *Enlargement* berjalan sebagai suatu proses tanpa titik akhir yang jelas. Setiap negara yang ingin bergabung menjadi anggota Uni Eropa tidak diberikan batas waktu yang jelas.

Berkenaan dengan keanggotaan, Turki memiliki keinginan untuk bergabung ke UE. Di beberapa aspek, Turki dinilai memiliki persamaan dengan arsitektur budaya Eropa seperti kota Istanbul. Terlebih, masyarakat Turki tidak condong ke kultur Timur Tengah, melainkan Eropa. Melalui beberapa persamaan tersebut, mendorong pemerintah Turki untuk memiliki hasrat bergabung ke UE. Proses atau perbincangan mengenai hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 1963 hingga sekarang. Namun, kondisi Turki secara domestik dan internasional menjadi penghambat proses keanggotaan EU. Maka daripada itu, isu kontroversial mengenai Turki sering menjadi perdebatan di sidang Dewan Eropa.

Turki diakui secara eksplisit sebagai kandidat negara anggota UE baru pada tahun 1995. Pada Desember 2002, UE memutuskan untuk membuka proses aksesinya dengan Turki tanpa penundaan, dengan syarat Turki dapat memenuhi kriteria Kopenhagen. Kriteria Kopenhagen merupakan 3 kriteria utama yang digunakan sebagai acuan sebuah negara memenuhi kualifikasi menjadi bagian Uni Eropa. Adapun tiga kriteria utama Kopenhagen adalah sebagai berikut:

1. Memiliki lembaga-lembaga stabil yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan penghormatan perlindungan minoritas;
2. Memiliki ekonomi pasar yang berfungsi dan memiliki kapasitas untuk menghadapi persaingan pasar di Uni Eropa;
3. Memiliki kemampuan untuk mengambil serta mengimplementasikan kewajiban anggota secara efektif, termasuk patuh pada peraturan.

Dalam upaya memenuhi kriteria Kopenhagen tersebut Turki banyak

mengubah tatanan negara dan sistem pemerintahan yang sebelumnya masih banyak memiliki sisi Islam menjadi sekuler dan demokratis. Dalam upaya tersebut Turki memerlukan waktu yang cukup lama hingga Kemudian pada Brussel Summit 2004, Uni Eropa memutuskan untuk membuka negosiasi dengan Turki karena Turki sudah memenuhi kriteria Kopenhagen. Proses aksesinya Turki ke Uni Eropa baru dibuka secara resmi pada 3 Oktober 2005 (Rahim 2013).

Masalah muncul ketika pemerintah Turki menjalankan proses tersebut. Pihak Eropa menyoroti sikap pemerintah Turki terhadap suku Kurdi. Suku Kurdi merupakan masyarakat yang tinggal sebagian di Ankara, Ibu kota Turki. Dalam sejarah, kelompok Kurdi telah mendirikan teritorialnya pada tahun 1922-1924 yang bernama Negara Darurat Kurdistan dan tahun 1946 yang bernama Republik Mahabad Kurdistan. Namun, pemerintah Turki merespon dengan operasi militer yang berakibat ribuan nyawa menghilang.

Di lain hal, Turki melakukan berbagai reformasi sistem pemerintahannya untuk memenuhi 35 bab sebagai syarat aksesinya Turki ke Uni Eropa. Namun, ternyata pemenuhan 35 bab tersebut menjadi hal yang sulit untuk Turki. Terbukti, di tahun 2016, Turki hanya dapat menyelesaikan syarat EU pada 6 bab. Di era Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, terdapat kebijakan-kebijakan yang mengarah ke otoritarianisme yang membuat Turki semakin jauh dari syarat UE. Puncak hambatan berada di tahun 2016, ketika kondisi politik Turki sedang genting. Saat itu, Angkatan Bersenjata Turki (TSK) melakukan kudeta terhadap pemerintahan resmi. Misalnya, di Ankara, TSK melakukan pengeboman. UE menyoroti kejadian tersebut sebagai pelanggaran HAM.

Ada beberapa skenario jika Turki berhasil masuk ke EU. Pertama, status

Turki akan semakin menguat terutama di Eropa dan NATO. Kedua, pemerintah Turki akan memiliki “privilege” dalam memperjuangkan kepentingannya di Timur Tengah. Namun, skenario tersebut akan sirna jika masalah Turki secara domestik maupun internasional tetap berada pada posisi stagnan atau tidak ada perubahan.

Penelitian ini ingin melihat hambatan akses Turki pada era Recep Tayyip Erdogan terkhusus pada tahun 2014-2022, dimana pada rentang tahun tersebut terdapat banyak kebijakan Erdogan yang Islamisasi dan desentralisasi, sementara kedua hal tersebut berlawanan dengan prinsip yang dianut oleh sebagian besar negara Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa Turki belum mampu menjadi bagian dari Uni Eropa di era Recep Tayyip Erdogan terkhusus pada tahun 2014-2022 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa hubungan internasional, khususnya dalam studi kawasan Eropa dan Timur Tengah.
2. Memberikan kontribusi kepada disiplin Ilmu Hubungan Internasional khususnya untuk melengkapi literatur terkait studi kasus Turki dan Uni Eropa pada penelitian-penelitian sebelumnya.
3. Mengetahui penyebab terhalangnya proses akses Turki pada tahun 2014-2022.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini akan berfokus pada analisis mengenai hambatan-hambatan Turki ke UE pada saat pemerintahan Erdogan atau pada tahun 2014-2022. Peneliti menggunakan tahun 2014 dikarenakan sejak saat Erdogan menjadi petinggi Turki, kebijakannya tidak pro terhadap Eropa seperti kebebasan atau HAM.

Penelitian ini termasuk ke dalam studi konstruktivisme. Peneliti dalam penelitian ini mencoba menganalisis hambatan-hambatan proses akses Turki ke Uni Eropa tahun 2014-2022. Proses akses Turki ke Uni Eropa sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1987, namun peneliti ingin membahas mulai dari tahun 2014 sampai 2022. Adapun alasan peneliti mengambil dari tahun 2014 karena pada tahun tersebut pemerintahan Turki dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, dimana pada masa pemerintahan Erdogan banyak kebijakan-kebijakan Turki yang menjauhi sekularisme.

Hal tersebut menarik perhatian peneliti bahwa ternyata individu memiliki peranan penting dalam terwujudnya sebuah fenomena internasional. Studi konstruktivisme, khususnya yang dicetuskan oleh Nicholas Onuf, dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa ternyata setiap individu itu memiliki sifat politik alamiah yang sudah ada sejak lahir yang kemudian memiliki peranan penting dalam terwujudnya sebuah fenomena internasional.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Menilik proses aksesinya Turki ke Uni Eropa adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas karena prosesnya yang sudah berlangsung sejak lama. Sudah banyak literatur yang membahas tentang proses aksesinya Turki ini dengan berbagai judul dan berbagai pokok pembahasan. Adapun pokok pembahasan tersebut dapat mengenai hambatannya, faktor-faktor, dan sejarah. Sebuah jurnal berjudul “Why not Turkey? Attitudes towards Turkish Membership in the EU among Citizens in 27 European Countries” merupakan sebuah jurnal yang membahas mengenai penolakan Turki menjadi anggota Uni Eropa oleh anggota member Uni Eropa. Jurnal dari JCMS (Journal of Common Market Studies) yang diterbitkan tahun 2011 itu ditulis oleh Jurgen Gerhards dan Silke Hans.

Jurgen dan Silke menyimpulkan kata tidak mungkin untuk Turki dapat bergabung menjadi anggota Uni Eropa mengingat banyak negara anggota Uni Eropa yang tidak menyetujui Turki untuk bergabung. Jurgen dan Silke juga memaparkan analisis kausal mereka yang menunjukkan bahwa sikap negara anggota Uni Eropa dapat berubah ke arah positif atau menyetujui Turki bergabung jika mereka yakin bahwa proses ekspansi tidak akan mengancam budaya dan tenaga kerja pasar di Uni Eropa atau peningkatan migrasi dari Turki ke negara-negara anggota yang lebih kaya. Sehingga Jurgen dan Silke memberikan kata mungkin untuk Turki dapat menjadi anggota Uni Eropa jika politisi dapat mempengaruhi cara pandang mereka yang cemas akan migrasi besar-besaran yang mungkin dapat terjadi setelah Turki bergabung. Jurnal ini menjelaskan faktor penghambat aksesinya Turki yang ada di dalam lingkaran Uni Eropa (Gerhards & Hans, 2011). Jurnal ini sudah cukup menjelaskan dengan baik dan detail namun dalam jurnal ini hanya

membahas satu faktor penghambat saja. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk membahas faktor-faktor lainnya.

Kemudian jurnal kedua berjudul “Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa” oleh Yozar Qohari Bil Ikhsan. Jurnal dari *Journal of International Relations* ini dipublikasikan pada tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang penemuan berbagai permasalahan demokrasi dan hak asasi manusia di Turki selama rentang waktu 2010- 2016 oleh Uni Eropa yang kemudian menjadi hambatan Turki masuk ke Uni Eropa. Yozar menuliskan bahwa Uni Eropa memiliki kriteria Kopenhagen untuk persyaratan aksesinya. Isi dari kriteria Kopenhagen tersebut diantaranya jaminan atas demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan serta perlindungan minoritas. Penemuan adanya permasalahan demokrasi dan hak asasi manusia di Turki tahun 2010-2016 oleh Uni Eropa membuat nilai Turki menjadi turun (Bil Ikhsan, 2019).

Sama seperti pada jurnal pertama, Yozar sudah menuliskan dengan baik dan jelas dalam jurnal tersebut namun tidak menuliskan hambatan-hambatan yang lain. Selanjutnya literatur ketiga ditulis oleh Sarah Khairiyah Nasution dengan judul “Hambatan Turki Untuk Menjadi Anggota Uni Eropa Pada Masa Presiden Erdogan”. Pada jurnal ini Sarah memaparkan hambatan Turki menjadi anggota Uni Eropa di masa Presiden Erdogan dengan jelas dan lengkap. Sarah menjelaskan permasalahan terkait demokrasi, hak asasi manusia, ekonomi dan latar belakang Turki yang merupakan negara dengan mayoritas muslim menjadi hambatan Turki menjadi anggota Uni Eropa (Nasution, 2020). Namun, pada jurnal ini belum dijelaskan hambatan-hambatan yang terjadi di tahun-tahun setelah pembekuan akses Turki oleh Uni Eropa tahun 2016.



Selanjutnya jurnal ke empat dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Turki Dengan Uni Eropa Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan (Tahun 2002-2010)” oleh Fitri Nayana. Dalam jurnalnya, Fitri menjelaskan tentang kebijakan Luar Negeri Turki pada masa Erdogan bersifat moderat dan rasional. Presiden Erdogan mengharmonisasikan prinsip islam ke dalam bentuk nasionalisme kebangsaan. Fitri menjelaskan pada masa pemerintahan Erdogan, Turki berkomitmen untuk membina hubungan baik dengan Uni Eropa, namun dari komisi dan anggota Uni Eropa memberikan pandangan skeptis atas itu. EU bersedia membuka akses ke Turki namun menunda-nunda proses (Nayana n.d.). Pada jurnal ini, Fitri Nayana sudah menjelaskan dengan jelas dan lengkap namun tidak membahas proses akses Turki pada tahun-tahun setelah pembekuan akses.

Kemudian, literatur yang ingin peneliti bahas selanjutnya adalah sebuah jurnal dari departemen hubungan internasional Universitas Airlangga yang ditulis oleh salah satu mahasiswanya yang bernama Probo Darono Yakti. Jurnal ini berjudul “Dinamika dan Hambatan-Hambatan Turki dalam Puluhan Tahun Proses Integrasi pada Uni Eropa”. Jurnal yang ditulis pada tahun 2016 ini menjelaskan bahwa pada dasarnya Uni Eropa merupakan regionalisme yang terbuka dan menerima anggota-anggota baru untuk perluasan. Namun Uni Eropa tidak dengan mudah menerima sembarang anggota. Ada kriteria kopenhagen sebagai persyaratan utama menjadi anggota Uni Eropa. Probo juga menjelaskan konflik-konflik di dalam maupun internasional yang terjadi di Turki menjadi hambatan Turki masuk ke Uni Eropa karena konflik-konflik tersebut sangat menyimpang dengan kriteria kopenhagen. Probo berpendapat bahwa Turki dapat masuk menjadi bagian Uni Eropa jika mengubah sistem pemerintahannya yang masih memasukkan islam ke

dalam segala peraturannya (Yakti, 2016). Jurnal karya Probo ini sangat menarik karena lengkap, namun masih belum membahas perkembangan proses akses Turki setelah pembekuan proses oleh Uni Eropa tahun 2016.

Secara keseluruhan jurnal-jurnal yang ada belum ada yang membahas proses akses Turki ke Uni Eropa pada rentang waktu 2014-2022, sehingga membuat peneliti ingin membuatnya dan menjadikan pembahasan ini sebagai studi untuk memahami teori konstruktivisme, dimana faktor sejarah menjadi penentu besar perilaku aktor negara.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Peneliti menggunakan teori konstruktivisme sebagai landasan teori untuk menganalisis penelitian ini. Konstruktivisme dalam pengertian umum merupakan suatu teori yang melihat dunia sebagai suatu konstruksi sosial dimana pandangan dari teori ini mengacu pada hakikat realitas dan hakikat pengetahuan. Konstruktivisme dalam hubungan internasional mulai didirikan sekitar akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990 oleh beberapa aktor hubungan internasional seperti, Nicholas Onuf, Alexander Wendt, Emanuel Adler, Friedrich Kratochwil, John Gerard Ruggie, dan Peter Katzenstein. Hadirnya teori konstruktivisme ini seakan memberikan angin baru untuk kancah hubungan internasional. Teori ini membawakan konsep yang selama ini diabaikan oleh teori-teori terdahulu seperti realisme, liberalisme, dan neoliberalisme. Konstruktivisme membawakan ide baru untuk memahami fenomena global. Teori ini memberikan alternatif jawaban bahwa sebuah peristiwa yang terjadi bukan hanya karena distribusi kekuatan material,

kekayaan, dan kondisi geografis saja, namun juga identitas dan norma (McGlinchey et al., 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori konstruktivisme yang dibawakan oleh Nicholas Onuf. Menurut pemikiran Onuf, tidak hanya sejarah saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu fenomena sosial. Menurut Onuf, pada dasarnya manusia sudah memiliki sifat politik sejak lahir. Sifat atau kemampuan politik ini dimaksudkan sebagai kemampuan manusia dalam menginfluence orang lain yang kemudian membuat suatu international order. Kaitan dari manusia dapat berkembang menjadi fenomena internasional dapat dipahami dari skema politik yang diciptakan Onuf bahwa Onuf percaya manusia lahir dengan kekuatan politik yang melekat, kemudian setelah individu bertemu dengan individu lainnya kemudian membentuk *body of politic* atau *political organised society* dimana karakteristik individu tadi berbaaur menjadi satu, muncul sistem yang mengorganisasikan secara politik yang apabila ditambah dengan wilayah dan kedaulatan maka terbentuklah suatu negara. kemudian dari proses tersebut negara dan fenomena internasional terbentuk setelah perkembangan dari state tentunya. State sendiri tentu memiliki pemerintahan formal dimension of rule dimana terdapat pengaturan yang sifatnya formal dan merupakan political formula dalam mengeksekusi fenomena politik (Onuf, 2012).

Fenomena Internasional bisa juga berangkat dari level sekumpulan orang yang memiliki interpretasi sama dalam melihat suatu fenomena. Onuf menekankan pada pentingnya *voice and language* untuk membentuk suatu *international order*. Menurut Onuf, ketika satu berbicara pasti ada pihak lain yang mendengarkan, ketika seseorang menuliskan sesuatu pasti ada pihak lain yang melihat atau

membaca tulisannya, dan ketika orang memberikan suatu sinyal atau pertanda maka juga ada pihak lain yang merasakan tandanya. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan *identical consciousness* yaitu dengan berbicara, melihat, dan merasakan orang memiliki *common sense*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme menurut Onuf ini meyakini group of people dapat memiliki interpretasi yang sama dalam melihat suatu fenomena internasional. (Onuf, 2012)

Jika ditarik garis besar, maka ada 2 poin besar dalam memahami teori konstruktivisme menurut Onuf. Yang pertama adalah Identitas. Identitas disini dimaksudkan sebagai kemampuan mengidentifikasi aktor sesuai dengan konstruksinya/asal mula. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Menurut Onuf dengan berbicara, melihat, dan merasakan individu memiliki *common sense*. Bahasa disini diartikan sebagai bagaimana dengan bahasa (berbicara, melihat dan merasakan) sebuah *international order* dapat terbentuk melalui pemikiran yang terbentuk setelah seseorang melihat, merasakan dan mendengarkan. Melalui pemikiran tersebut akhirnya akan membentuk suatu kebijakan baru (Onuf 2012).

Fenomena sosial yang terjadi di antara Turki dan Uni Eropa dapat menjadi jawaban untuk memahami teori konstruktivisme menurut Onuf ini. Yang pertama, Identitas disini dikaitkan dengan peran Presiden Recep Tayyip Erdoğan dalam proses akses Turki ke Uni Eropa yang tidak kunjung selesai. Erdogan yang datang ke kursi pemerintahan Turki dibawa oleh partai AKP memiliki misi besar dalam mengembalikan Turki menjadi negara yang bercorak Islam seperti saat pemerintahan Utsmaniyah. Disisi lain, corak Islam yang identik dengan pola otoritarianisme tidak sejalan dengan sekularisme yang menjadi corak pemerintahan Uni Eropa. Hal ini membuat hubungan Turki-Eropa jadi memiliki pembatas karena

pola pemerintahannya yang tidak sejalan. Kemudian yang kedua, Bahasa disini dikaitkan dengan bagaimana negara-negara Uni Eropa memandang sama ke Erdogan melalui *speech* yang kemudian menyebabkan mereka memiliki keraguan untuk menerima Turki bergabung. Hal ini menyatakan bahwa bahasa (*speech*) Erdogan dapat mempengaruhi fenomena sosial yang terbentuk (aksesi Turki ke Uni Eropa) karena dengan melihat, mendengarkan dan merasakan orang (negara-negara Uni Eropa) memiliki *common sense* (Onuf 2012).

**Tabel 1 Uraian Poin-Poin Teori Konstrutivisme Menurut Onuf**

Poin Teori	Pengertian
Identitas	Bahwa konstruksi sosial dapat terjadi karena pengaruh sifat politik/asal muasal yang dimiliki oleh aktor.
Bahasa	Bahwa konstruksi sosial terjadi dipengaruhi oleh Bahasa. Bahwa dengan melihat, mendengar dan merasakan Bahasa seseorang dapat memiliki intepretasi tertentu dalam memahami suatu kejadian dan mendorongnya untuk melakukan konstruksi sosial.

Sumber: Diolah mandiri oleh peneliti

### 1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini peneliti meletakkan argumen sementara saya mengenai beberapa hambatan proses akses Turki ke Uni Eropa diantaranya adalah kondisi domestik Turki yang tidak stabil, dimana terdapat perpecahan di dalamnya. Kemudian juga Presiden Erdogan memiliki peran dalam proses yang tak kunjung

selesai ini, maksudnya ada kemungkinan kebijakan Erdogan akhirnya mempengaruhi Uni Eropa untuk menerima Turki atau tidak. Kemudian selain itu juga, Turki beberapa kali terlibat konflik dimana Turki melakukan pelanggaran HAM dalam konflik tersebut. Sebagai contoh, ketika Turki mengalami kudeta pada tahun sekitar 2016-an, dalam kudeta tersebut pemerintahan Turki melakukan serangan pada pelaku kudeta yang mana serangan tersebut merupakan suatu pelanggaran HAM.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai cara mendapatkan informasinya. Secara tujuan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah kondisi suatu konteks yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam dalam kondisi yang sebenar-benarnya atau alami (*natural setting*) (Nugrahani 2014). Dan ada pula penelitian kualitatif sering kali digunakan untuk penelitian yang membahas mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan (Corbin & Strauss 2015).

### **1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hambatan akses Turki sebagai subjek dan Uni Eropa sebagai objek.

### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan sumber-sumber data sekunder sebagai referensi penelitian. Adapun sumber-sumber data sekunder tersebut berbentuk buku, jurnal, website, artikel dan berita. Peneliti juga akan menguji kevalidan data tersebut terlebih dahulu sebelum menuangkannya ke dalam penelitian ini.

### 1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, Peneliti akan mencari literatur yang memang dirasa tepat untuk membahas studi kasus yang Peneliti ambil dalam penelitian ini. Nantinya Peneliti juga akan banyak melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi untuk bagaimana sebaiknya skripsi ini dibuat.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan untuk membuat sistematis, penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab utama:

- **BAB I: Pendahuluan**

Bagian ini, peneliti menguraikan mengenai latar belakang proses penelitian ini dilakukan dengan beberapa sub-bab pendukung seperti rumusan masalah, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, teori penelitian, dan metodologi.

- **BAB II: Kebijakan Turki dan Hubungan Turki dengan Negara Tetangga**

Pada bab ini, peneliti akan membahas tiga sub bab. Yang pertama, kebijakan luar negeri Turki era Erdogan. Kemudian yang kedua, politik domestik Turki era Erdogan. Terakhir, membahas tentang hubungan Turki dengan negara-negara tetangganya, terkhusus Yunani, Suriah, Prancis, dan Belanda.

- **BAB III: Hambatan-Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa**

Pada bab ini, peneliti akan membahas dua sub bab. Yang pertama, Identitas “Islam” dan “Otoriter” Erdogan yang menjadi penyebab penundaan akses. Kemudian yang kedua, pidato-pidato Erdogan menanggapi isu domestik dan internasional yang menjadi penghambat proses akses.

- **BAB IV: Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pada bab ini, peneliti akan menyimpulkan penelitian yang telah diuraikan terutama pada bab II dan bab III. Peneliti juga akan menambahkan rekomendasi kepada peneliti yang lain untuk melanjutkan penelitian ini.



## **BAB II**

### **Kebijakan Turki dan Hubungan Turki dengan Negara Tetangga**

Pada bab I, peneliti sudah menjelaskan mengenai latar belakang penelitian hingga sistematika pembahasan. Maka daripada itu, untuk menyempurnakan penelitian ini, peneliti menggunakan bab II sebagai landasan untuk bab III. Di bagian ini, peneliti telah membaginya dalam 3 sub-bab utama. Pertama, peneliti akan menguraikan kebijakan luar negeri Turki di bawah pemerintahan Erdogan. Kedua, peneliti membahas mengenai hubungan Turki terhadap Yunani, Suriah, Perancis, dan Belanda. Terakhir, peneliti juga menjelaskan mengenai politik domestik atau isu-isu politik yang ada di Turki serta respon Erdogan terhadap isu-isu tersebut.

#### **2.1. Kebijakan Luar Negeri Turki Era Erdogan**

Kebijakan luar negeri Turki pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan memiliki arah yang berbeda dengan kebijakan luar negeri pada saat pemerintahan Turki belum dipegang oleh partai AKP. Arah kebijakannya cenderung meninggalkan dunia barat dari fokus kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri konvensional ala Mustafa Kemal Atatürk cenderung menekankan perlunya dan pentingnya menjaga hubungan dekat dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.

Sementara pada pemerintahan Recep Tayyip Erdogan, kebijakan luar negerinya cenderung mulai meninggalkan dunia barat. Meskipun tidak sepenuhnya, namun fokusnya kini lebih berkembang tidak hanya pada Amerika Serikat dan

Eropa saja, melainkan merambah ke negara-negara tetangga atau negara masih dalam kawasan Timur Tengah.

Aktor dalam kepengurusan kebijakan luar negeri ini pun tidak hanya dikelola oleh diplomat-diplomat dan pejabat keamanan saja, tetapi juga mengajak perusahaan swasta, badan amal, dan yayasan pendidikan turut serta di dalamnya. Pengertian lebih luasnya kebijakan luar negeri era Presiden Recep Tayyip Erdoğan ini cenderung lebih antagonistik dan berkaitan dengan hiper-presidensialisme dimana pengambilan kebijakannya personalistik dan semakin hierarkis (Soler i Lecha et al 2022).

Corak pemerintahan Turki setelah era baru (kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan) dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan Republik baru, dimana hadirnya partai AKP yang memiliki perspektif otoritarianisme memberikan warna baru pada kebijakan luar negeri Turki. Ada banyak pengamat yang memberikan argumennya bahwa kemunculan AKP ini sebagai pertanda keluarnya partai tersebut dari kebijakan luar negeri “Kemalis konvensional” yang mana ideologi dari kebijakan tersebut dianut oleh sebagian besar negara Republik. Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Turki setelah pembaharuan Republik baru, pada sekiranya tahun 2017, dibagi di dalam dan di antara beberapa entitas yang berada pada struktur penasihat formal dan informal.

## **2.2 Hubungan Turki dengan Yunani, Suriah, Prancis, dan Belanda**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat negara yang berkaitan secara langsung dengan Turki di beberapa tahun belakangan. Hal ini juga mempertimbangkan isu-isu yang belum terselesaikan hingga respon balik Turki

yang keras. Hubungan Turki dengan Yunani dan Suriah akan mengacu kepada konflik sengketa perbatasan. Di lain hal, Prancis juga ikut menjadi hambatan Turki bergabung ke Uni Eropa dikarenakan isu-isu domestik Prancis yang tidak selaras dengan politik Turki. Sikap yang sama diungkapkan oleh Erdogan terhadap Belanda meskipun Belanda mendukung aksesi Turki di UE.

### **2.2.1 Hubungan Turki dengan Yunani**

Turki dan Yunani merupakan bagian dari NATO. Namun, kedua negara tersebut memiliki banyak perselisihan terkait permasalahan batas laut, luas landas kontinen, wilayah udara, dan juga konflik Siprus sejak lama (CNBC 2022).

Permasalahan terkait batas laut ini disebut sengketa maritim Turki - Yunani. Konflik beku yang terjadi sejak intervensi militer Turki di Siprus tahun 1974 ini memiliki 3 poin utama yang menjadi permasalahan. Pertama, ketidaksepakatan atas batas-batas perairan teritorial Yunani dan kepemilikan pulau tertentu di Laut Aegea. Kedua, pertanyaan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara di Mediterania Timur. Kemudian yang ketiga, konflik panjang Siprus yang belum terselesaikan. Selain 3 poin tersebut, Turki juga mengemukakan hubungannya dengan Yunani tidak terbatas pada 3 poin permasalahan tersebut tetapi masih ada sejumlah masalah lain, antara lain status kedaulatan atau demiliterisasi pulau-pulau Yunani tertentu yang masih belum terselesaikan (Brookings Institution 2021).

Konflik Turki-Yunani ini di era Erdogan tidak menunjukkan kondisi lebih baik, bahkan terjadi konflik tumpang tindih. Pada tahun 2019-2020, Turki-Yunani juga masih mengalami konflik perebutan kedaulatan atas perairan Mediterania. Baru-baru ini, konflik Turki-Yunani ini kian memanas. Turki bahkan melakukan ancaman berulang kali ke Yunani karena Yunani melakukan aktivitas di Laut

Aegea. Pada 7 Desember 2022, Kementerian Luar Negeri Yunani menyatakan ketidak penerimaannya terhadap ancaman Turki yang mengancam akan melakukan perang ke Yunani jika Yunani masih melakukan latihan militer di Kepulauan Aegea (Hakim 2022). Konflik Turki-Yunani yang berkelanjutan ini dapat memberikan nilai negatif untuk Turki masuk ke Uni Eropa, karena Yunani merupakan negara anggota Uni Eropa.

### **2.2.2 Hubungan Turki dengan Suriah**

Konflik Suriah dimulai dari pemberontakan oposisi pemerintah Suriah melawan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, sebagai respon Suriah terhadap peristiwa *Arab Spring*. Konflik yang awalnya bertujuan untuk melengserkan Bashar Al-Assad kemudian menjadi konflik berkepanjangan yang melibatkan banyak aktor di dalamnya. Terdapat kelompok-kelompok yang bergabung dalam pertempuran seperti kelompok Tentara Pembebasan Suriah (FSA), Pejuang Pemberontak Kurdi, Hizbullah, dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Rusia dan Iran juga turut terlibat dalam konflik tersebut sebagai kubu yang mendukung pemerintah Suriah. Sementara itu, Turki berada pada kubu oposisi bersama dengan beberapa kekuatan Barat dan beberapa negara di Teluk Arab (ShelterBox, n.d.).

Dalam konflik ini, Turki memiliki kontribusi yang besar di kubu oposisi. Turki memainkan peran sebagai pihak ketiga yang mencoba untuk memenangkan posisi oposisi pemerintah Suriah dan juga mengupayakan agar krisis kemanusiaan tidak bertambah parah disana. Tidak hanya mengupayakan dalam politik, tetapi Turki juga menampung pengungsi dari Suriah. Keterlibatan Turki dalam penanganan pengungsi Suriah memberikan pengaruh baru atas Uni Eropa. Sekitar 3,6 juta pengungsi dari Suriah telah memasuki Turki sejak awal perang tersebut

pada tahun 2011. Populasi pengungsi yang terus meningkat itu kemudian mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di Turki. Bahkan Walikota Istanbul yang bernama Ekrem Ymamoylu sempat mengatakan bahwa pengelolaan pengungsi Suriah di Turki buruk (Branislav 2020).

Beberapa politisi Turki juga menganggap pengungsi sebagai ancaman keamanan. Logika yang dicoba untuk dipahami adalah dengan Turki membantu penyelesaian konflik maka masalah pengungsi bisa teratasi. Namun, ternyata cara Turki menyelesaikannya justru menciptakan noda untuk hubungannya dengan Uni Eropa karena upaya Turki yang kebanyakan berupa operasi militer hanya akan banyak menumpahkan darah. Contoh operasi militer yang dilakukan Turki seperti pada tahun 2020, dimana Turki dan Rusia membuat kesepakatan tempat dan waktu untuk melakukan adu militer di Suriah (Roth 2020). Operasi militer Turki di Suriah, telah menyebabkan hubungan antara UE dan Turki semakin memburuk setelah dinodai oleh kurangnya demokrasi sejak kegagalan militer kudeta pada tahun 2016 (Branislav 2020).

### **2.2.3 Hubungan Turki dengan Prancis**

Hubungan kurang baik antara Turki dan Prancis sebenarnya tercipta karena masalah-masalah sederhana yang diciptakan oleh kedua belah pihak itu sendiri. Turki, di bawah Erdogan, cenderung lebih sentimental ketika melihat kebijakan-kebijakan Macron terhadap Muslim Prancis. Erdogan memberikan respon-respon yang kemudian membuat Prancis merasa Turki terlalu ikut campur dalam urusan politik domestiknya. Selain itu, kedua negara tersebut juga bersaing di tingkat kebijakan luar negeri internasional, seperti keduanya sama-sama memperebutkan hegemoni regional. Sama halnya dengan Turki yang sentimen terhadap kebijakan

Prancis untuk Muslim Prancis. Prancis juga kritis terhadap sikap-sikap Turki di konflik Mediterania Timur, seperti perilaku Turki di Suriah, dukungan militer Turki untuk Libya yang diakui secara internasional, perjanjian maritim Turki dengan Tripoli, dan eksplorasi gas alam Turki di kawasan Mediterania Timur yang disebut telah melanggar kedaulatan maritim Yunani dan Siprus (Denizeau, n.d).

Jika membahas mengenai Turki yang suka ikut campur dengan politik domestik Prancis maka erat kaitannya dengan Islamophobia, dimana Turki dibawah pemerintahan Erdogan tidak menyukai dan tidak setuju dengan gagasan islamophobia, sementara Prancis merupakan negara anti-Muslim yang di bawah pemerintahan Emmanuel Macron menjadi semakin jelas keekstrimannya terhadap muslim. Macron banyak melakukan penghinaan terhadap muslim yang kemudian mendapatkan kecaman dunia termasuk Turki. Seperti pada Oktober 2021 lalu, Macron sempat menerbitkan undang-undang baru yang berisi larangan penggunaan lambang agama dan memperbolehkan seniman untuk membuat karya karikatur Nabi Muhammad SAW, yang mana hal tersebut merupakan sebuah penghinaan terhadap Muslim (Daily Sabah 2021).

Macron terpilih menjadi Presiden Prancis pada 2017, sejak saat itu Prancis menjadi negara yang terkesan mengekang umat Islam, meskipun dapat dikatakan juga bahwa Eropa merupakan kawasan yang tidak terlalu liberal terhadap umat Islam. Bahkan kekhawatiran terhadap masyarakat Islam disana meluas menjadi stigmatisasi. Macron menilai Islam sebagai ideologi mematikan dengan menyebutkan kerusuhan teroris seperti Al-Qaeda dan Daesh (ISIS) di Perancis sebagai contoh atas penyebutan “ideologi mematikan” yang ia sebutkan. Macron

juga menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang menjadi krisis di seluruh dunia (Daily Sabah 2020).

Menanggapi penilaian Macron atas Islam ini, Erdogan merespon dengan keras. Dikutip CNBC tahun 2020, Erdogan melakukan kecaman terhadap Macron. Erdogan bahkan meragukan kesehatan mental Macron yang mengapa bisa membenci Islam sampai seperti itu (CNBC Indonesia 2020). Pada tahun yang sama yakni 2020, Erdogan juga sempat menyerukan ajakan untuk memboikot produk-produk dari Prancis sebagai respon terhadap seruan Macron yang menghina Islam (Detiknews 2020).

Ketegangan antara Erdogan dan Macron ini berdampak pada proses akses Turki ke Uni Eropa, dimana sikap Erdogan yang tidak berdamai dengan Prancis memberikan tambahan nilai negatif masyarakat Prancis terhadap Turki. Tidak hanya sekedar itu, gagasan memahami Islam dari kedua negara tersebut juga berbeda, dimana salah satunya anti-Islam. Karena ketika Erdogan masih menjabat sebagai Perdana Menteri Turki, Prancis merupakan salah satu negara yang menahan masuknya Turki ke Uni Eropa karena faktor-faktor seperti Turki yang mayoritas Islam, kekhawatiran akan migrasi Muslim ke Prancis, sejarah genosida Armenia dan keterlibatan Turki di konflik Siprus dan Kurdi. Tokoh politik seperti Laurent Fabius dan Francois Bayrou juga mengklaim bahwa bergabungnya Turki ke Uni Eropa akan sangat mengancam struktur politik Eropa (Oßenbrügge 2015).

#### **2.2.4 Hubungan Turki dengan Belanda**

Belanda merupakan negara yang mendukung akses Turki ke Uni Eropa pada awalnya, bahkan Belanda adalah negara yang membukakan pintu pembukaan

negosiasi resmi akses Turki ke Uni Eropa pada 2004. Namun, dukungan Belanda ini tidak kemudian membuat Turki mudah untuk masuk ke Uni Eropa karena Turki tetap harus memenuhi kriteria Kopenhagen untuk bergabung ke Uni Eropa. Pemenuhan kriteria Kopenhagen oleh Turki tidak berjalan dengan mulus karena prosesnya yang terjadi sangat lambat dan juga kondisi politik Turki setelah AKP memberikan penilaian Uni Eropa ke Turki lebih cenderung ke arah negatif terus (University of Cologne 2017).

Namun, perkembangannya terdapat kekecewaan Belanda atas sikap Turki. Turki pada rezim AKP, terutama Erdogan menunjukkan rezim yang semakin menuju ke otokratis, dimana menjauhi prinsip demokrasi yang digunakan sebagian besar negara di Uni Eropa. Langkah-langkah pengambilan kebijakan yang dilakukan Erdogan dikatakan tidak proporsional oleh Belanda. Mereka mengkhawatirkan tentang eskalasi di Turki dan juga percampuran tangan Turki dalam komunitas Turki-Belanda yang mencoba melakukan perlawanan terhadap gerakan Gulen (University of Cologne 2017).

Perkembangan terakhir hubungan Turki dan Belanda ditandai dengan ketegangan di antara keduanya yang tercipta karena pengusiran salah satu menteri Turki di Belanda pada 2017, yakni Fatma Betül Sayan. Kejadian tersebut terjadi sebagai respon Belanda untuk mengurangi ketegangan referendum di Belanda. Fatma Betül Sayan diutus ke Belanda untuk keperluan mengumpulkan komunitas Turki di Belanda untuk mendukung atau memilih Turki dalam referendum. Namun hal tersebut ditanggapi oleh Erdogan dengan kemarahan seperti menyebut Belanda sebagai Republik Pisang dan tuduhan Barat masih mengikuti ajaran Nazi. Tentunya hal tersebut memperkeruh hubungan Turki dengan Belanda (BBC Indonesia 2017).



### 2.3 Politik Domestik Turki Era Erdogan

Arah pemerintahan Turki bergerak seputar islamisme dan sekularisme, yang mana kaum sekuler akan terus menyuarakan aksinya dan kaum islamis pun juga akan terus mengupayakan cita-citanya. Islamisme disini dimaksudkan sebagai ide atau gagasan yang merupakan ikon pemerintahan Ottoman yang kemudian dicoba dihidupkan kembali oleh AKP setelah mengalami sekularisasi pada reformasi era Kemal Ataturk. Erdogan adalah seorang Presiden Turki yang dibawa oleh AKP sebagai utusan untuk islamisme Turki itu. AKP sendiri merupakan singkatan dari *Adalet ve Kalkinma Partisi*. AKP adalah sebuah partai demokratik konservatif namun non konvensional dengan akar Islamis. Sebelum Erdogan menjadi Presiden, Partai AKP ini memenangkan kepemimpinan Turki dengan Abdullah Gull sebagai Presidennya dan Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menternya (Britannica, n.d.).

Prestasi-prestasi yang diukir oleh Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah Gull (Presiden pertama Turki dari AKP) ini mendapat banyak apresiasi dari masyarakat Turki. Banyak dari mereka yang terkesan dengan proyek-proyek islamisasi yang dilakukan sepasang penguasa negara ini. Satu dari beberapa proyek-proyek tersebut diantaranya adalah kebijakan penggunaan hijab untuk muslimah. Jika sebelumnya, ada pelarangan-pelarangan mengenai perempuan berhijab, di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah gull, larangan-larangan tersebut dihapuskan. Puncak popularitas AKP tidak berhenti sampai disini saja. Pada 2 pemilihan umum berikutnya, partai ini kembali memenangkan kursi dengan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presidennya. Pada pemilu 2011, Recep Tayyip Erdogan memegang jabatan perdana menteri, sama

seperti sebelumnya. Kemudian pada tahun berikutnya, 2014, ia menjabat menjadi Presiden Turki. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, AKP juga masih memenangkan kursi dengan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden. (Junaidi, 2016)

Erdogan dalam menjadi Presiden Turki membawa Turki pada posisi nanggung dalam menjalin hubungan dengan Uni Eropa, dimana Turki memiliki keinginan untuk menjadi anggota Uni Eropa tetapi disisi lain, Turki terkadang melakukan hal yang bertentangan dan bahkan menentang Uni Eropa. Pada cara Erdogan memandang LGBT misalnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari bagaimana Presiden Erdogan mengecam gerakan LGBT di negaranya. Homoseksualitas memang tidak dilarang di Turki, namun beberapa tahun terakhir sekiranya 2018-2021, Erdogan melarang gerakan komunitas LGBT di Turki. komunitas tersebut bahkan menghadapi banyak larangan hukum dan juga dimusuhi oleh masyarakat. Selain itu juga pernikahan sesama jenis juga masih belum diakui di Turki. (Hürriyet Daily News 2019)

Pada tahun 2021, masyarakat pro LGBT dan komunitas LGBT bahkan telah melaporkan adanya diskriminasi dan pelecehan yang meluas terhadap LGBT. Pada tahun yang sama, Erdogan pernah melakukan suatu siaran video yang ditujukan kepada anggota Partai AKP yang bunyinya:

“Kami akan membawa anak muda kami ke masa depan, bukan sebagai pemuda LGBT, tetapi sebagai pemuda yang ada di masa lalu kejayaan bangsa kami”.

Pidato Erdogan tersebut dilakukan sebagai salah satu respon terhadap aksi 4 mahasiswa yang dilaporkan membuat karya seni dengan simbol LGBT yang digabungkan dengan gambar di sebuah situs Islam (Hamsici 2021).

Selain LGBT, ada juga isu sosial yang besar di Barat tetapi tidak di Turki, khususnya pada pemerintahan Erdogan. Feminis Turki menunjukkan bahwa proses sekularisme saat ini dipertaruhkan di bawah kekuasaan AKP. Erdogan memperlihatkan secara terang-terangan hal hal dalam feminisme yang bertentangan dengan apa yang diyakininya. Dikutip dari sebuah halaman berita The Guardian tanggal 24 November 2014, Recep Tayyip Erdogan pernah melakukan seksisme terang-terangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki karena perbedaan biologis. Erdogan meyakini bahwa kondisi fisik yang dialami perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan kasar yang dapat dilakukan oleh laki-laki (The Guardian 2014).

Bahkan Turki dibawah kepemimpinan Erdogan dan AKP juga berusaha menutup kelompok hak asasi perempuan terbesarnya yang bernama *We Will Stop Femicide* (WWSF). Erdogan sudah mengajukan keluhan terhadap komunitas itu sejak 2016 lalu dan baru mengajukan gugatan penutupan WWSF di Turki pada april 2022 ini. Erdogan beralasan bahwa komunitas ini membuat keluarga menjadi terkesan tidak penting dengan alasan hak asasi perempuan (Women's Media Center 2022). Kebijakan Turki atas feminisme dan LGBT memiliki arah yang berlawanan dengan Uni Eropa, dimana feminisme dan LGBT dibebaskan di Uni Eropa.

Selain itu, politik domestik Turki juga diwarnai dengan duel pihak pro kemalisme dan AKP. Keduanya terus bersaing sampai pada titik dimana salah satunya menyerah. Ketika partai islam seperti AKP menduduki kursi pemerintahan

bertahun-tahun, para kaum sekuler tetap menyuarakan suara kebenciannya dan Upaya menjatuhkan Erdogan sendiri sudah pernah dicoba dilakukan pada tahun 2016 lalu ketika kaum sekuler dengan dukungan masyarakat Turki yang tidak memihak Erdogan mencoba melakukan kudeta pemerintahan Erdogan.

Pada percobaan kudeta tersebut, banyak terjadi pelanggaran HAM karena pada saat itu, Erdogan meminta pendukungnya turun ke jalan untuk melawan dan kekacauan dan pertumpahan darah yang lebih parah terjadi. Terdapat sedikitnya 251 orang tewas dan 2200 luka-luka. Namun kemudian dalam hitungan jam kudeta tersebut dapat dihentikan. Kudeta tersebut dilakukan oleh militer Turki yang mereka menyebutkan ingin menyelamatkan demokrasi dari tangan Erdogan yang otoritarianisme (Ibrahim 2022).

Kejadian tersebut menjelaskan bahwa memang kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersifat otoritarianisme dimana tentu hal tersebut tidak menjunjung tinggi nilai demokrasi(Wijaya, 2016). Perihal perseteruan kaum sekuler dan kaum islamisme ini menimbulkan kondisi perpolitikan Turki yang kurang stabil. Sementara itu, Uni Eropa merupakan sebuah organisasi antarpemerintah dan supranasional yang menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk memajukan dalam bidang ekonomi, keamanan, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya.

## **BAB III**

### **Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa**

Untuk menyempurnakan penelitian ini, peneliti menggunakan bab III untuk menguraikan beberapa pembahasan penting. Secara sistematis, peneliti telah membagi pembahasan menjadi dua sub-bab utama. Pertama, mengenai nilai Islam yang dianut oleh Erdogan dalam merespon isu-isu politik Turki. Kedua, menjadikan pidato Erdogan dalam membentuk konstruksi sosial. Dua alasan ini diimplementasikan berdasarkan teori konstruktivis oleh Onuf yang telah dijelaskan dengan cermat pada bab I.

#### **3.1 Identitas “Islam” dan “Demokrasi Konservatif” yang Dianut oleh Erdogan**

Terhalangnya Turki masuk ke Uni Eropa antara lain disebabkan oleh identitas “Islam” dan “Demokrasi Konservatif” yang dianut oleh Erdogan. Seperti yang sudah peneliti tulis pada bab sebelumnya, corak pemerintahan Turki selalu diwarnai dengan dua pola, yakni sekularisme dan Islamisme. Dua konsep tersebut sulit untuk dilepaskan dari pemerintahan Turki. Keduanya sama-sama penting dalam sejarah Turki, Islamisme sebagai corak yang dibawa Ottoman (sejarah awal wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Turki) dan sekularisme merupakan paham yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk (tokoh reformasi Turki setelah Ottoman).

Identitas “Islam” yang dimiliki Erdogan sendiri sudah dimiliki oleh Erdogan sejak lahir. Erdogan lahir di perkampungan Rize pada 26 Februari 1945 dari pasangan suami istri bernama Ahmet Erdogan dan Tanzile Erdogan. Erdogan besar dalam lingkungan keluarga muslim dan lingkungan keras. Identitas “Islam”

yang dimiliki Erdogan mulai terlihat ketika Erdogan sekolah di sekolah menengah atas. Pada saat itu Erdogan di kenal sebagai orator yang sangat lantang dalam menyuarakan politik Islam (Habibah 2022)

Identitas “Islam” disini dimaksudkan sebagai karakter “Islam” yang melekat kuat dalam pemerintahan Erdogan, dimana Erdogan membawa identitas “Islam” nya ke dalam pembentukan suatu kebijakan Turki. Erdogan mengukung gagasan nasionalisme Turki-Islam dalam pemerintahannya. Namun, pada praktek pembuatan kebijakannya, gagasan penyatuan Islam dan sekularisme ini akhirnya berjalan tidak beriringan, dimana salah satunya menjadi lebih dominan dan mengaburkan yang lainnya. Islam lebih terasa condong dalam pemerintahan Erdogan, dimana berpengaruh kepada hubungan Turki dengan negara-negara di Uni Eropa yang anti-Islam.

Sebagai contohnya seperti hubungan Turki dengan Prancis. Ketegangan antara Turki dan Prancis menjadi penghambat akses Turki ke Uni Eropa, karena Prancis merupakan negara anggota Uni Eropa yang menahan Turki untuk bergabung ke Uni Eropa. Asal mula hubungan yang buruk di antara Turki dan Prancis adalah perbedaan kepercayaan yang dimiliki Erdogan dan Macron. Keislaman yang dimiliki oleh Erdogan tidak selaras dengan persepsi Macron mengenai Islam. Hal ini terlihat atau dapat dibuktikan melalui fenomena sosial di Prancis. Macron menyuarakan pembelaannya terhadap seorang Guru bernama Samuel Paty pada tahun 2020 yang menunjukkan kepada siswanya sebuah karikatur Nabi Muhammad yang tengah telanjang dengan alat kelamin yang terlihat (Tergesen and Rubin 2020). Macron melakukan pembelaan terhadap yang dilakukan Samuel Paty. Saat itu, Paty dibunuh pada saat penyerangan mendadak

oleh teroris Islam. Macron mengatakan bahwa serangan tersebut adalah sebuah rencana dari teroris Islam dan Macron juga mengatakan “*our compatriot was killed for teaching children freedom of speech*”. Dengan perkataan tersebut, Macron menilai bahwa yang dilakukan Paty tidak salah karena mencoba mengajarkan anak-anak kebebasan untuk berbicara. Perkataan Macron ini mendapatkan banyak kecaman dari dunia Muslim seperti Turki. Turki bahkan mengecam dengan cara memboikot produk-produk Prancis (Daily Sabah 2021).

Contoh lain seperti ketika Macron memberlakukan undang-undang yang intinya melarang penggunaan identitas keagamaan di tempat umum. Meskipun Macron sempat mengecam pihak-pihak yang mengaitkan Islam dan terorisme, dalam pemberlakuan undang-undang ini pada faktanya masih terdapat aparat yang melakukan sentimen terhadap perempuan berhijab (BBC Indonesia 2019). Dalam hal ini, perbedaan ini kemudian membuat Erdogan bertindak atas perlakuan buruk Macron terhadap Muslim Prancis. Bermula dari ini kemudian Prancis memiliki rasa tidak suka dengan Turki yang terlalu mencampuri urusan domestiknya. Akibatnya Prancis kemudian menyerang Turki dari segi lain seperti contohnya Prancis mengkritisi Turki di konflik Mediterania Timur, perilaku Turki di Suriah, dukungan militer Turki untuk Libya, perjanjian maritim Turki dengan Tripoli, dan eksplorasi gas alam Turki di Mediterania Timur yang disebut telah melanggar kedaulatan maritim Yunani dan Siprus (Denizeau, n.d).

Selain identitas “Islam” yang dimiliki Erdogan menyebabkan konflik antara Turki-Prancis, identitas “Islam” yang dimiliki Erdogan ini juga mempengaruhi bagaimana Erdogan menanggapi isu-isu sosial yang berlawanan dengan prinsip Islam namun dibebaskan di Barat. Seperti contohnya, bagaimana Erdogan

menanggapi LGBT dan feminisme di negaranya. Homoseksualitas memang tidak dilarang di Turki, namun beberapa tahun terakhir sekiranya 2018-2021, Erdogan melarang gerakan komunitas LGBT di Turki. Hal ini disebabkan oleh penilaian Erdogan yang menurutnya telah mengganggu nilai-nilai nasional dan spiritual Turki. Erdogan juga menilai gerakan tersebut akan meracuni generasi bangsa (detikNews 2020). Komunitas tersebut bahkan menghadapi banyak larangan hukum dan juga dimusuhi oleh masyarakat. Meskipun rakyat Turki diperbolehkan homoseksualitas namun, Erdogan tidak mengizinkan adanya pernikahan sesama jenis di Turki. Lebih tepatnya pernikahan sesama jenis di Turki belum diakui secara hukum (Hürriyet Daily News 2019).

Sejak 2017, pemerintah Turki sudah melakukan pelarangan-pelarangan untuk kaum LGBT. Erdogan melarang LGBT mengadakan acara secara terbuka di depan publik, seperti penayangan film, diskusi panel, wawancara, pameran, pelarangan adanya perkumpulan kaum tersebut (CNN Indonesia 2017). Aktivis LGBT yang melanggar dan diketahui oleh aparat pemerintah ditangkap oleh kepolisian. Pada November 2017, terdapat setidaknya 19 aktivis LGBT yang ditangkap oleh kepolisian karena diduga telah melakukan sebuah pertemuan ilegal usai acara LGBTQ+ di kampus Middle East Technical University (Deutsche Welle 2020).

Pada tahun 2021, masyarakat pro LGBT dan komunitas LGBT bahkan telah melaporkan adanya diskriminasi dan pelecehan yang meluas terhadap LGBT. Pada tahun yang sama, Erdogan pernah melakukan suatu siaran video yang ditujukan kepada anggota AKP yang bunyinya:



“Kami akan membawa anak muda kami ke masa depan, bukan sebagai pemuda LGBT, tetapi sebagai pemuda yang ada di masa lalu kejayaan bangsa kami”.

Pidato Erdogan tersebut dilakukan sebagai salah satu respon terhadap aksi 4 mahasiswa yang dilaporkan membuat karya seni dengan simbol LGBT yang digabungkan dengan gambar di sebuah situs Islam (Hamsici 2021).

Menurut laporan *the Europe Branch of The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* menempatkan Turki peringkat ke-2 setelah Azerbaijan sebagai negara yang melakukan diskriminasi terhadap homoseksual (Bilginsoy and Badendieck 2022). Sikap Erdogan yang melarang gerakan komunitas LGBT ini terjadi karena Erdogan merasa khawatir komunitas tersebut akan merusak generasi bangsanya.

Selain LGBT, ada juga isu sosial yang besar di Barat tetapi tidak di Turki, khususnya pada pemerintahan Erdogan. Feminis Turki menunjukkan bahwa proses sekularisme saat ini dipertaruhkan di bawah kekuasaan AKP. Erdogan memperlihatkan secara terang-terangan pemikiran-pemikiran dari feminisme atau kegiatan feminisme yang bertentangan dengan apa yang diyakininya. Dikutip dari *The Guardian* 24 November 2014, Recep Tayyip Erdogan pernah melakukan seksisme terang-terangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki karena perbedaan biologis. Erdogan meyakini bahwa kondisi fisik yang dialami perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan kasar yang dapat dilakukan oleh laki-laki (The Guardian 2014). Dalam hal ini, Erdogan memiliki pemikiran seperti itu melalui identitas “Islam”nya, dimana menurut islam laki-laki dan

perempuan tidak sama karena keduanya diciptakan dengan tugas yang berbeda (Republika 2020).

Bahkan Turki dibawah kepemimpinan Erdogan dan AKP juga berusaha menutup kelompok hak asasi perempuan terbesarnya yang bernama *We Will Stop Femicide* (WWSF). Erdogan sudah mengajukan keluhan terhadap komunitas itu sejak 2016 lalu dan baru mengajukan gugatan penutupan WWSF di Turki pada April 2022 ini. Erdogan beralasan bahwa komunitas ini membuat keluarga menjadi terkesan tidak penting dengan alasan hak asasi perempuan (Women's Media Center 2022). Kebijakan Turki atas feminisme dan LGBT memiliki arah yang berlawanan dengan Uni Eropa. Hal ini mengacu pada kebijakan UE yang liberal atau mengakui bahwa LGBT merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya, pengaruh sikap otoritarianisme dalam akses Turki ke Uni Eropa. Sebenarnya, Turki dalam era Erdogan tidak memperkenalkan pada dunia bahwa pemerintahannya otoritarianisme, Turki di era Erdogan menyebut identitasnya sebagai negara yang Islam namun Demokrasi Konservatif. Dalam hal ini, Turki menyoroti pembentukan kebijakan Turki yang Islam namun juga demokrasi. Meskipun pada awalnya AKP mengatakan ingin melawan otoritarianisme kemalisme, namun berjalannya waktu mereka justru menciptakan otoritarianisme dengan konsep yang dibuat sendiri melalui demokrasi konservatif yang mereka ciptakan. Tidak sedikit juga pihak yang menilai kebijakan Erdogan terkesan otoritarianisme (Yavuz and Ozturk 2019). AKP, memang sudah menunjukkan identitas Islamnya yang tidak otoritarianisme sejak awal, namun setelah peristiwa kudeta Juli 2016, AKP dibawah Erdogan menunjukkan otoritarianisme jenis baru nya yaitu dengan menjadikan Erdogan sebagai satu-

satunya pembuat keputusan di AKP yang kemudian diterapkan di bagaimana mengelola pemerintahan Turki baru. Beberapa orang yang meneliti ini menaruh curiga sikap Erdogan tersebut sebagai respon perasaan tidak amannya terhadap kubu kemalis. Hal ini menimbulkan citra kurang baik Turki di mata negara Barat karena demokrasi konservatif yang di kenalkan Turki justru menunjukkan kesan pemerintahan yang kurang demokrasi dan menjadikan Presiden sebagai satu-satunya pemegang kendali (Yavuz and Ozturk 2019).

Contoh sikap demokrasi konservatif Erdogan yang dinilai otoritarianisme dapat dilihat dari penangkapan Fethullah Gulen. Erdogan mencurigai Gulen sebagai penyebab dari peristiwa kudeta 2016. Fakta yang ada, bukti Gulen sebagai penyebab dari peristiwa tersebut tidak kuat, namun Erdogan tetap melakukan penangkapan terhadapnya. Gulen juga mengatakan bahwa penangkapannya merupakan contoh lain dari pemerintahan Erdogan yang otoriter karena Turki tidak memiliki peradilan yang independen. Selain itu juga, pasca peristiwa kudeta tahun 2016, peradilan Turki melakukan penangkapan besar-besaran pihak-pihak yang dicurigai tergabung dalam peristiwa kudeta tersebut dari berbagai sektor (Christiastuti 2016).

Contoh lain dapat dilihat dari bagaimana urusan isi khutbah masjid di Turki yang menjadi kewenangan *Diyamet*. *Diyamet* adalah kementerian Turki yang mengurus bidang agama. Dalam pemerintahan Erdogan, *Diyamet* memiliki peran penting dalam penyusunan teks khutbah masjid di Turki, dimana setiap imam diharuskan menunggu teks khutbah dari *diyanet* untuk kemudian dibacakan ke jamaah (Geotimes 2020). Kebijakan yang diterapkan Erdogan ini menunjukkan

sikap yang tidak demokratis, dimana seluruh imam jamaah sholat jumat di Turki diharuskan menyampaikan khutbah sesuai dengan yang diinginkan oleh Erdogan.

Otoriter Erdogan juga terlihat ketika Erdogan mengusir 10 Duta Besar dari Turki. Para duta besar tersebut yaitu Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Pengusiran tersebut disebabkan oleh sikap para duta besar yang mengkritik kebijakan Erdogan atas kasus Osman Kavala yang dinilai tidak mendapatkan kejelasan hukum pidana yang jelas.

Osman Kavala sudah ditahan sejak 2017 dikarenakan Erdogan menilai Osman Kavala telah mencoba menggulingkan pemerintahan Erdogan dengan beberapa cara seperti dari pembiayaan biaya protes anti-pemerintah di Taman Gezi pada tahun 2013 sampai mencurigai keterlibatannya pada kudeta tahun 2016. Hal ini memberikan penilaian negatif Turki di mata UE karena selain sikap otoriter yang kurang demokratis. (CNBC Indonesia 2021).

Identitas “Islamisme” dan “Demokrasi Konservatif” yang dianut Erdogan memberikan dampak terhadap akses Turki ke Uni Eropa. Islamisme Erdogan mendorong Erdogan untuk menunjukkan sikap tidak sukanya pada Negara Uni Eropa yang anti-Islam yang kemudian membuat hubungan Turki dengan Negara tersebut buruk dan berakibat pada aksesinya karena kehilangan dukungan dari salah satu anggota.

Selain itu juga, identitas “Islam” yang dimiliki Erdogan mempengaruhi Erdogan mengambil suatu kebijakan atau keputusan terhadap hal-hal yang lazim di Barat namun dilarang di Islam, seperti LGBT dan feminisme. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kontra di Barat. Kemudian yang kedua otoritarianisme

Erdogan membuat Turki menjauhi Barat dengan lunturnya demokrasi karena pemerintahan yang desentralisasi. Selain itu juga, Kebijakan demokrasi konservatif Erdogan membawa ia bertindak sesuai dengan kemauan sendiri, yang berakibat pada pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal tersebut juga memberikan penilaian buruk Turki di mata Uni Eropa dan tentunya menghambat proses aksesi juga.

Identitas yang dimiliki Erdogan ini selaras dengan poin pertama teori konstruktivisme Onuf yang peneliti tuliskan di landasan konseptual, dimana karakteristik Individu berpengaruh dalam terjadinya suatu fenomena sosial. Dalam hal ini, karakteristik Erdogan yang cenderung islamis dan otoriter berpengaruh dalam ia menentukan kebijakannya yang kemudian membuat Turki menjauhi Barat dan memperlambat proses aksesinya.

## **3.2 Pidato Erdogan Sebagai Konstruksi Sosial**

### **3.2.1 Pidato Erdogan Menanggapi Isu Internasional**

Pertama-tama, bagian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pidato Erdogan dapat mempengaruhi citra baik Turki di Uni Eropa yang kemudian hal tersebut berdampak pada proses aksesinya. Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai kaitan pidato Erdogan menanggapi isu domestik dan internasional dengan terhambatnya aksesi Turki. Seperti yang sudah penulis uraikan pada landasan teori bab 1, bahasa memiliki pengaruh dalam terjadinya suatu fenomena sosial. Menurut Onuf, dengan bahasa seseorang bisa memiliki *common sense*. Dengan berbicara, melihat, dan merasakan seseorang bisa menyimpulkan sesuatu hal. Melalui penyimpulan sesuatu hal tersebut dapat menyebabkan suatu

*international order* terbentuk (Onuf 2012). Menurut Onuf juga, sekumpulan orang yang berada dalam satu komunitas atau organisasi akan memiliki interpretasi yang sama dalam melihat suatu hal. Penulis menggunakan indikator pidato Erdogan dalam menanggapi isu domestik dan internasional untuk mencoba memahami teori konstruktivisme Onuf.

Pertama, penulis akan membahas pidato Erdogan yang menanggapi konflik dengan Yunani. Permasalahan antara Turki-Yunani memiliki tiga poin utama untuk menjelaskan apa yang terjadi diantara keduanya. yang pertama adalah terkait dengan Laut Aegea. Keduanya memperebutkan kepemilikan pulau tertentu di Laut Aegea. Yang kedua, permasalahan terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara tersebut di Mediterania Timur. Kemudian yang terakhir adalah terkait konflik panjang Siprus yang belum juga terselesaikan (Brookings Institution 2021). Terkait konfliknya dengan Yunani, Turki sempat melontarkan beberapa kali pidato yang kemudian mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Contoh pidato Turki terhadap Yunani yang mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional diantaranya seperti yang terjadi pada waktu-waktu belum lama ini. Saat itu, Turki memberikan ancaman ke Yunani karena mempersenjatai pulau-pulau Aegean yang di demiliterisasi. Erdogan yang merasa Yunani telah melanggar aturan pada perjanjian 1923 dan 1947 yang mengatur kedaulatan Yunani di Laut Aegea memberikan ancaman pada 22 Juli 2022 melalui pidatonya. Erdogan mengatakan dalam pidatonya:

*“Adalari işgal etmeniz filan, bizi bağlamaz. Wakti saati geldiğinde gerekeni yaparız. Dediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz.”* (“Pulau-pulau yang anda tempati tidak mengikat kami, kami akan melakukan apa yang

diperlukan ketika saatnya tiba, seperti yang kami katakan, kami bisa datang tiba-tiba suatu malam.”)

Pada pidato tersebut Erdogan mengatakan ancamannya ke Yunani jika Turki bisa saja melakukan penyerangan secara tiba-tiba di waktu malam sekalipun (Gingeras 2022).

Pidato Erdogan tersebut mengundang komentar Uni Eropa. Uni Eropa menyatakan keprihatinan atas permusuhan yang terus menerus terjadi antara Yunani dan Turki. Juru Bicara kebijakan luar negeri UE, Peter Stano mengungkapkan keprihatinannya tersebut pada awal September 2022. Peter Stano mengatakan bahwa gesekan antara Turki dan Yunani yang terjadi terus menerus tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran yang serius pada keamanan dan bertentangan dengan upaya de-eskalasi di Mediterania Timur (Fatunnisa 2022). Dikutip dari *Reuters* pada 6 September 2022, Peter mengatakan:

*“Aggressive threats and rhetoric are unacceptable and must stop. We ask for a peaceful settlement respecting international law”* (Reuters 2022).

Hal ini menunjukkan kekhawatiran juga akan penilaian Turki di mata UE yang memburuk yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses akses Turki ke Uni Eropa. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya pidato Erdogan bisa menimbulkan *common sense* UE untuk kemudian melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan kekhawatiran UE terhadap konflik Yunani-Turki.

Contoh lain dari pidato Erdogan ke Yunani baru-baru terjadi pada perhelatan G20 sekitar November. Pidato tersebut berisi pengulangan ancaman yang sama seperti yang dilakukan Erdogan pada Juli 2022. Dalam pidatonya,

Erdogan menyelipkan ancamannya kepada Yunani dengan mengatakan bahwa usaha Yunani untuk memperlihatkan keberadaan militernya di Aegea tidak ada hasilnya dan tidak berguna (Fiedler 2022).

Selain pidato pada bulan Juli dan November tersebut, Erdogan juga sempat melakukan pidato pada 18 Mei 2022. Pidato tersebut berisikan:

*“Onların uçakları bize gösteriyorlar, ne yapıyorsunuz? kendine gel. Tarihten ders almıyor musunuz? Türkiye ile dans etmeyin! Yorulacaksınız ve yolda sıkışıp kalacaksınız. Artık onlarla ikili görüşme yapmıyoruz. Bu Yunanistan hiçbir sebep görmeyecek. Kişisel hakaret oyununa girmeyeceğim.”* (“Anda terus menunjukkan kepada kami dengan pesawat Anda, Apa yang Anda lakukan? Menarik diri bersama-sama. Apakah Anda tidak belajar pelajaran dari sejarah?. Jangan mencoba berdansa dengan Turki. Anda akan lelah dan terjebak di jalan. Kami tidak lagi mengadakan pembicaraan bilateral dengan mereka. Yunani ini tidak akan melihat alasannya, saya tidak akan terlibat dalam permainan penghinaan pribadi.”) (Reuters 2022).

Pidato yang dilakukan Erdogan secara terus menerus terhadap Yunani itu menimbulkan ketegangan yang serius antara keduanya. Hal ini tentu akan berakibat pada proses aksesi Turki ke Uni Eropa. Selanjutnya, selain pidato dengan Yunani, Erdogan juga melakukan pidato-pidato lainnya yang kemudian mempengaruhi proses aksesi Turki ke UE. Contohnya seperti pidato Erdogan menanggapi pembelaan Macron terhadap Samuel Paty yang dibunuh teroris karena mengajarkan pada anak-anak kartun Nabi Muhammad SAW. Pidato Erdogan adalah sebagai berikut:

*“Fransa'nın başındaki kişi yolunu kaybetmiştir. Bütün gün Erdoğan'dan bahsediyor. Önce kendinize ve nereye gittiğinize bakın. Dün Kayseri'de*



*dediğim gibi. o bir vaka ve gerçekten kontrol edilmesi gerekiyor.*” (“Orang yang bertanggung jawab atas Prancis telah tersesat. Dia bercerita tentang Erdoğan sepanjang hari. Lihatlah diri Anda terlebih dahulu dan ke mana Anda akan pergi. Saya katakan di Kayseri kemarin, dia adalah kasus dan dia benar-benar harus diperiksa”) (Dailysabah 2020).

Pidato tersebut dilakukan Erdogan di siaran televisi provinsi Timur Malatya (Dailysabah 2020). Dalam pidato ini terdapat poin penting yaitu Pidato Erdogan tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada yang memicu dari tindakan atau perkataan yang dilakukan Macron. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat pidato Erdogan yang memberikan 2 kunci, yaitu ungkapan tidak suka Erdogan dan tanggapan Erdogan tentang Macron yang membicarakannya. Ungkapan tidak suka Erdogan terjadi karena Macron membela Samuel Paty yang menghina Nabi Muhammad SAW dan tanggapan Erdogan tentang Macron terjadi karena sebelumnya Macron sudah membicarakannya. Dengan demikian berarti, melalui ungkapan atau bahasa seseorang memiliki *common sense* yang kemudian mempengaruhi sikapnya kemudian. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme Onuf yang menekankan pada *international order* dapat terbentuk melalui bahasa.

### **3.2.2 Pidato Erdogan Menanggapi Isu Domestik**

Kemudian selanjutnya membahas pidato Erdogan menanggapi isu domestik. Terdapat dua bahasan menarik mengenai isu domestik Turki yang menjadi penghambat proses akses Turki ke UE. Yang pertama adalah isu LGBT di Turki, khususnya di bawah pemerintahan Erdogan dan isu feminisme. Kedua hal tersebut sama-sama diakui dengan pengakuan penuh di Eropa namun tidak demikian di Turki.

Pada tahun 2021, Erdogan sempat melakukan pidato di depan anggota AKP. Pidato tersebut terjadi sebagai respon terhadap karya seni mahasiswa di Universitas Bogazici yang menggabungkan simbol LGBT dengan Islam. Dalam pidato tersebut, Erdogan menuduh aktivis LGBT merusak nilai-nilai kebangsaan dan spiritual Turki juga meracuni anak bangsa. Bunyi pidato tersebut sebagai berikut:

*“Siz LGBT gençliği değilsiniz, ve vandalizm eylemleri yapan gençlik değilsiniz. Aksine kırılan kalpleri tamir eden sizlersiniz”.* (“Kalian bukan pemuda LGBT, bukan pemuda yang melakukan aksi vandalisme. Sebaliknya, kamulah yang memperbaiki hati yang patah.”) (Hamsici 2021).

Pidato Erdogan ini mengundang respon dunia internasional terkhususnya negara Barat, dimana mayoritas negara Barat mendukung LGBT. Dari pidato tersebut, Erdogan dikecam oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa (Westjava 2021). Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, memberikan kecaman pada retorika Erdogan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan:

*“Kami prihatin dengan penahanan mahasiswa dan demonstran lainnya dan sangat mengutuk retorika anti LGBT seputar demonstrasi.”* (CNBC Indonesia 2021).

Kemudian, terkait isu feminisme, Erdogan memiliki pemikiran yang sedikit lain dengan feminisme. Menurut Erdogan, kesetaraan perempuan dan laki-laki bukan berarti perempuan bebas untuk melepaskan *kodratnya* sebagai seorang Ibu. Menurut Erdogan, perempuan dan laki-laki setara dalam hal-hal seperti berpendapat dan memilih, tetapi mereka tetap memiliki perbedaan yang tidak boleh

dilupakan, yaitu *kodrat* perempuan sebagai ibu. Erdogan mengatakan dalam pidatonya di *Women and Democracy Association* tahun 2016:

“Tidak peduli seberapa sukses karir seorang wanita, wanita yang menyangkal takdirnya sebagai seorang ibu, yang menyerah mengurus rumah tangga akan kehilangan keunikan dari seorang wanita” (Tuysuz 2016).

Namun, retorika Erdogan tersebut mendapat kritikan dari para kritikus. Mereka mengatakan bahwa yang dikatakan Erdogan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan. Para kritikus juga ada yang menyebutkan bahwa perempuan mempunyai kontribusi besar dalam kemajuan perusahaan (Tuysuz 2016).

Dari pidato-pidato Erdogan terkait isu domestik dan internasional yang sudah penulis paparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan berpidato orang lain akan memiliki interpretasi tersendiri dari kalimat-kalimat yang diucapkan dalam pidato. Berangkat dari interpretasi ini kemudian akan berkembang menjadi kesimpulan atau kesepakatan bersama. Dari pidato-pidato Erdogan ini kemudian menimbulkan pemikiran-pemikiran oleh anggota UE yang kemudian membuat UE melakukan penundaan atas akses Turki.

Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme Onuf. Menurut Onuf dengan berbicara, melihat, dan merasakan individu memiliki *common sense*. Bahasa disini diartikan sebagai bagaimana dengan bahasa (berbicara, melihat dan merasakan) sebuah *international order* dapat terbentuk melalui pemikiran yang terbentuk setelah seseorang melihat, merasakan dan mendengarkan. Melalui pemikiran tersebut akhirnya akan membentuk suatu kebijakan baru (Onuf 2012). Dalam hal

ini, pidato-pidato Erdogan (bahasa) dapat membentuk pemikiran negara anggota Uni Eropa yang kemudian menyebabkan penundaan aksesinya Turki ke Uni Eropa.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 2.1. Kesimpulan

Terdapat 2 poin utama dalam memahami teori konstruktivisme menurut Onuf. Menurut Onuf suatu fenomena sosial itu terbentuk dari dua hal yakni identitas dan bahasa. Yang pertama adalah Identitas. Identitas disini dimaksudkan sebagai kemampuan mengidentifikasi aktor sesuai dengan konstruksinya atau asal usulnya. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Onuf meyakini bahwa dengan berbicara, melihat, dan merasakan individu akan memiliki interpretasi tertentu. Bahasa disini diartikan sebagai bagaimana dengan bahasa (berbicara, melihat, dan merasakan) sebuah *international order* dapat terbentuk melalui pemikiran atau interpretasi setelah seseorang melihat, merasakan, dan mendengar. Melalui pemikiran tersebut akhirnya akan membentuk suatu kebijakan baru. Onuf juga menambahkan bahwa individu dalam suatu perkumpulan akan membentuk interpretasi yang sama.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa hambatan akses Turki ke Uni Eropa di tahun 2014-2022 (era Erdogan) terdapat 2 hambatan yang sejalan dengan teori Onuf. Pertama identitas “Islam” dan “otoriter” yang dimiliki Erdogan menjadi penyebab terhambatnya akses. Peneliti sebutkan sebagai penghambat akses karena identitas “Islam” dan “otoriter” Erdogan memberikan kontribusi Erdogan dalam menjalankan pemerintahan. Kebijakan yang dilakukan Erdogan menjadi lebih Islami dan dalam menanggapi isu domestik maupun internasional. Sementara itu, terdapat beberapa hal dalam Islam yang bertolak belakang dengan ideologi yang

dimiliki Barat. Hal itu akhirnya menimbulkan gesekan antara Turki dengan Barat yang kemudian mengakibatkan proses aksesinya terhambat.

Kebijakan Erdogan juga terkesan otoriter, terbukti dari sistem pemerintahan yang tersentral pada Presiden. Sistem pemerintahan yang otoriter ini mengakibatkan pada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Erdogan. Pelanggaran - pelanggaran HAM merupakan hal yang tidak bisa diterima di UE. Dengan demikian berarti identitas “otoriter” Erdogan memberikan pengaruh terhadap aksesinya Turki ke UE.

Hambatan yang kedua adalah peran pidato Erdogan menanggapi isu domestik dan internasional dalam terhambatnya proses aksesinya Turki ke UE. Berangkat dari identitas “Islam” yang dimiliki Erdogan membawa pidato-pidato tersebut menjadi retorika-retorika untuk menanggapi isu di dunia Barat yang dianggap benar. Seperti contohnya ketika Erdogan melakukan pidato terkait LGBT dan feminisme. Dalam pidatonya terkait LGBT, Erdogan menunjukkan ketidakberpihakannya dengan LGBT dengan mengatakan bahwa LGBT dapat merusak bangsa. Sementara menurut Barat membebaskan LGBT merupakan salah satu cara menghargai atau menghormati hak kebebasan orang lain. Terkait feminisme, Erdogan juga memiliki retorika lain dari Barat. Hal tersebut, Erdogan tunjukkan melalui pidatonya yang mengatakan bahwa pada intinya perempuan tidak akan menjadi perempuan seutuhnya jika menolak menjadi Ibu. Hal ini juga bertentangan dengan Barat yang juga menganggap bahwa “menjadi ibu” adalah pilihan bukan kewajiban. Melalui pidato-pidato tersebut menimbulkan tanggapan tidak senang dari UE yang berakibat pada penundaan aksesinya Turki ke UE.

## 2.2 Rekomendasi

Untuk membuat penelitian ini bervariasi, peneliti merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan pada penelitian selanjutnya. Hal ini untuk membuat dunia akademik terutama pada kasus Erdogan dan UE bervariasi.

1. Membuat analisis kebijakan luar negeri Turki terhadap UE menggunakan perspektif *decision making*.
2. Menganalisis hubungan Turki terhadap negara-negara yang berada di UE.



## DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia. 2017. "Lima hal seputar pertikaian Turki dan anggota Uni Eropa." *BBC*, March 13, 2017.
- BBC Indonesia. 2019. "Presiden Prancis: 'Jangan memberi cap buruk kepada Muslim dan pemakai hijab.'" *BBC*, October 18, 2019.
- Bilginsoy, Zeynep, and Robert Badendieck. 2022. "Turkey: Anti-LGBTQ display reflects nation's political shift." *AP News*, September 23, 2022.
- Branislav, Stanicek. 2020. "EU-Turkey relations in light of the Syrian conflict and refugee crisis | Think Tank | European Parliament." European Parliament.
- Britannica. n.d. "Turkey - Foreign affairs since 1950 | Britannica." Encyclopedi Britannica. Accessed December 8, 2022.
- Brookings Institution. 2021. "Turkey, Europe, and the Eastern Mediterranean: Charting a way out of the current deadlock." *Brookings Institution*, January 28, 2021.
- Christiastuti, Novi. 2016. "Diperintahkan Ditangkap, Fethullah Gulen: Ini Contoh Sifat Otoriter Erdogan." *detikNews*, August 5, 2016.
- CNBC Indonesia. 2020. "Mengapa Turki Menyerang Suriah?"
- CNBC. 2022. "Erdogan Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Yunani, Ada Apa?" June 12022.
- CNBC Indonesia. 2020. "Geger Erdogan Ngamuk, Macron Sebut Islam



- Agama Krisis.” *CNBC Indonesia*, October 25, 2020.
- CNBC Indonesia. 2021. “Waduh! Biden Kecam Keras Erdogan, Ada Apa?” *CNBC Indonesia*, February 4, 2021.
- CNBC Indonesia. 2021. “Simak Nih, Reaksi 10 Negara yang Dubesnya Diusir Oleh Erdogan.” *CNBC Indonesia*, October 25, 2021.
- CNN Indonesia. 2017. “Turki Larang Film dan Festival Berbau LGBT.” *CNNIndonesia*, November 20, 2017.
- Crisis Group. 2021. “Rising Tensions in the Eastern Mediterranean.” Crisis Group.
- Daily Sabah. 2020. “Macron targets French Muslims, putting freedom of religion at risk.” *Daily Sabah*, October 2, 2020.
- Dailysabah. 2020. “Outrage over Macron's Islamophobic remarks mounts in Muslim world.” *Daily Sabah*, October 25, 2020.
- Daily Sabah. 2021. “Macron continues Islamophobic hate speech over war on terror.” *Daily Sabah*, August 29, 2021.
- Denizeau, Aurélien. n.d. *Turkish-French Relations: History, Present, and the Future*. Edited by Aurélien Denizeau. Springer. Accessed December 17, 2022.
- Detiknews. 2020. “Presiden Turki Erdogan Serukan Boikot Produk Prancis.”

- detikNews*, October 27, 2020.
- Deutsche Welle. 2020. "Kontroversi Soal Hak LGBTQ+ di Turki – DW – 28.04.2020." *DW*, April 28, 2020.
- EU Delegation to Turkey. n.d. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Accessed July 1, 2022.
- European Union. 2022. "Foreign and Security Policy." Accessed June 19, 2022
- Fatunnisa, Hani. 2022. "Uni Eropa Prihatin dengan Sikap Bermusuhan Turki Pada Yunani." *Dunia*, September 6, 2022.
- Fiedler, Tristan. 2022. "Erdoğan repeats threat against Greece during G20." *POLITICO*, November 16, 2022.
- Geotimes. 2020. "Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia." *GEOTIMES*, 2020.
- Gingeras, Ryan. 2022. "Why Erdogan Might Choose War with Greece." *War on the Rocks*, October 5, 2022.
- The Guardian. 2014. "Recep Tayyip Erdoğan: 'women not equal to men.'" *The Guardian*.
- Hakim, Ikhsan A. 2022. "Geram Terus Diancam Perang oleh Turki, Yunani Tak Terima." *Kompas TV*, December 7, 2022.
- Hamsici, Mahmut. 2021. "Turkey's Erdogan denounces LGBT youth as police arrest students." *BBC*.
- Hamsici, Mahmut. 2021. "Turkey's Erdogan denounces LGBT youth as police arrest students." *BBC*, February 2, 2021.

Hürriyet Daily News. 2019. "Turkey 2nd most restrictive country on gay rights in Europe - Türkiye News." Hürriyet Daily News.

Ibrahim, Arwa. 2022. "What was Turkey's failed coup about – and what's happened since?" Al Jazeera.

Junaidi, Ahmad. 2016. "Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme

Turki Kontemporer." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6 (November):

142-199.

McGlinchey, Stephen, Christian Scheinplug, and Rosie Walters, eds. 2017.

*International Relations Theory*. N.p.: E-International Relations.

Neset, Siri, Mustafa Aydin, Hasret D. Bilgin, and Metin Gurcan. 2019.

"Turkish

foreign policy: structures and decision-making processes."

Onuf, Nicholas G. 2012. *World of Our Making: Rules and Rule in Social*

*Theory and International Relations*. Routledge.

Oßenbrügge, Stene J. 2015. *Turkey and the EU. The Reasoning of the*

*French Government's Opposition Against the Accession*. N.p.:

GRIN Verlag.

Republika. 2020. "Islam Setarakan Pria dan Wanita, Hal Ini yang

Membedakan." *Republika*, June 11, 2020.

Reuters. 2022. "Turkey's Erdogan halts talks with Greece as tensions flare again." *Reuters*, June 1, 2022.

Roth, Andrew. 2020. "Russia and Turkey agree ceasefire in Syria's Idlib

- province.” *The Guardian*, March 5, 2020.
- ShelterBox. n.d. “The Syrian Conflict Explained.” ShelterBox. Accessed December 12, 2022.
- Soler i Lecha, Eduard, Funda Tekin, Nicholas Danforth, and Ilke Toygür. 2022. *Turkey's Foreign Policy and Its Consequences for the EU: In-depth Analysis*. European Parliament.
- Tergesen, Anne, and Richard Rubin. 2020. “Demonstrations Pay Homage to French Teacher Beheaded After Lesson on Charlie Hebdo.” *The Wall Street Journal*, October 18, 2020.
- The Council of Europe. n.d. Guardian of Human Rights, Democracy and the Rule of Law for 700 million citizens. Accessed July 1, 2022.
- Tuysuz, Gul. 2016. “7 times Turkish President Erdogan 'mainsplained' womanhood.” *CNN*, June 9, 2016.
- University of Cologne. 2017. “The Netherlands.” Feuture.
- Westjava. 2021. “Dikecam AS dan Uni Eropa Soal Unjuk Rasa LGBT di Turki, Ini ...” *westjavatoday.com*, February 6, 2021.
- Wijaya, Pandasurya. 2016. “Ini sederet alasan tentara Turki ingin meng kudeta Erdogan” *Merdeka.com*, July 20, 2016.
- Women's Media Center. 2022. “Turkey Is Trying to Shutter Its Largest Women's Rights Group.” Women's Media Center.
- Yavuz, Hakan, and Ahmed E. Ozturk. 2019. “Turkish secularism and Islam

under the reign of Erdoğan.” *Southeast European and Black Sea Studies*. <https://doi.org/10.1080/14683857.2019.1580828>.

